

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara masyarakat ikut serta dan mau bekerja sama dengan pemerintah sesuai yang diharapkan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, peran masyarakat yaitu sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah memiliki peran membimbing dan mengarahkan sehingga tercapainya pembangunan ekonomi sesuai yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan peran pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas nasional agar tercapainya tujuan atau sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat berbagai macam masalah dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya yaitu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau disebut kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Kemiskinan sering terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan yang cukup sulit, kemiskinan memang masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Pada kondisi seperti sekarang ini tingkat kemiskinan bukan hanya dilihat dari kualitas perekonomian yang rendah, namun dilihat dari

berbagai sudut pandang dan bergantung kepada pandangan yang digunakan (Isa et al., 2019).

Pemerintah baik pusat ataupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari titik permasalahan. Kebijakan serta program yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan masih sering terjadi karena kebijakan dan penanggulangan kemiskinan lebih mengarah pada program sektoral. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna.

Ibnu katshir menjelaskan secara detail bahwa miskin ialah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga ia diberikan yang sekiranya menutupi sedikit kebutuhan diri dan keluarganya. Mengutip hadist ibnu khatsir yang menjelaskan mengenai kemiskinan secara eksplisit.

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ الْقُمَّةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ
الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَ لَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَنْصَدِّقُ عَلَيْهِ ، وَ لَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

Yang artinya:

Bukanlah orang miskin itu orang yang keliling meminta-minta kepada manusia lalu ia ditolak dengan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan suatu kecukupan untuk mencukupinya dan tidak ada yang mengetahui kondisinya untuk memberi sedekah kepadanya.

Penggunaan makna farq yang dapat diidentikkan dengan kemiskinan adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 268

الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۗ وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

Tahun	Persentase
2015	17,10
2016	16,48
2017	16,07
2018	14,75
2019	14,56

Sumber Badan Pusat Statistika NTB

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa presentase tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 sekitar 17,10 persen. Angka ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Tingkat kemiskinan pada tahun 2016 mencapai 16,48 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya tahun 2017, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 16,07 persen. Penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2018, dimana tingkat kemiskinan mencapai 14,75 persen, hal ini disebabkan oleh terjadinya musibah gempa bumi yang menimpa NTB yang berdampak pada melambatnya penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 dimana hanya mampu mencapai 14,56 persen.

Data Kemiskinan di Indonesia menurut provinsi dilihat dari tabel 1.2 dibawah pada tahun 2018, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu sebesar 14,75 persen dengan peringkat ke-8 tingkat kemiskinan di provinsi yang berada di Indonesia.

Tabel 1.2

Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018

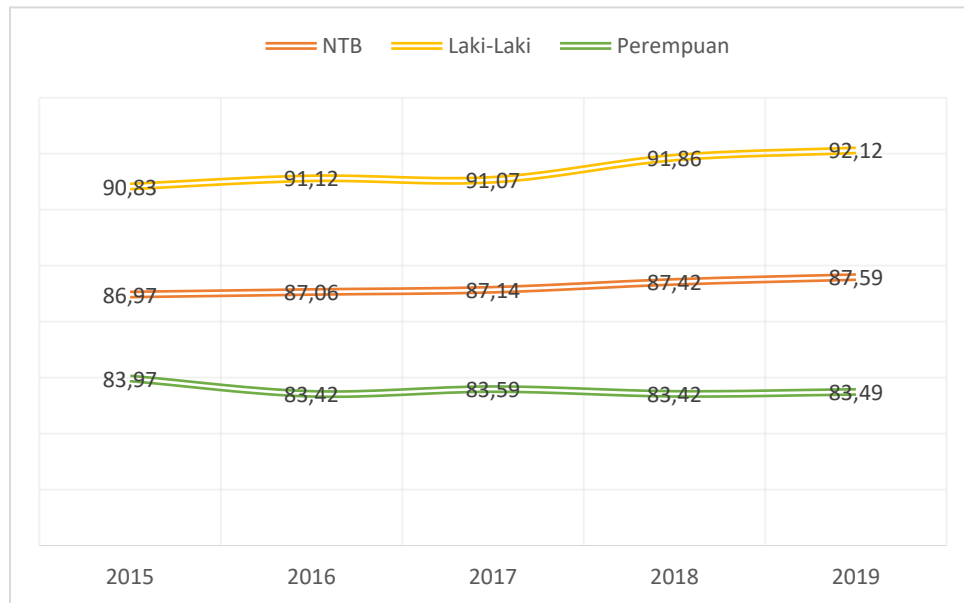
Provinsi	Penduduk Miskin (Persen)
ACEH	15,97
SUMATERA UTARA	9,22
SUMATERA BARAT	6,65
RIAU	7,39
JAMBI	7,92
SUMATERA SELATAN	12,8
BENGKULU	15,43
LAMPUNG	13,14
KEP. BANGKA BELITUNG	5,25
KEP. RIAU	6,2
DKI JAKARTA	3,57
JAWA BARAT	7,45
JAWA TENGAH	11,32
DI YOGYAKARTA	12,13
JAWA TIMUR	10,98
BANTEN	5,24
BALI	4,01
NUSA TENGGARA BARAT	14,75
NUSA TENGGARA TIMUR	21,35
KALIMANTAN BARAT	7,77
KALIMANTAN TENGAH	5,17
KALIMANTAN SELATAN	4,54
KALIMANTAN TIMUR	6,03
KALIMANTAN UTARA	7,09
SULAWESI UTARA	7,8
SULAWESI TENGAH	14,01
SULAWESI SELATAN	9,06
SULAWESI TENGGARA	11,63
GORONTALO	16,81
SULAWESI BARAT	11,25
MALUKU	18,12
MALUKU UTARA	6,64

PAPUA BARAT	23,01
PAPUA	27,74
INDONESIA	9,82

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia

Tingginya persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat pemerintah dalam hal ini melakukan hal untuk pengentasan terhadap kemiskinan. Dalam hal ini perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang efisien untuk mengatasinya. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan di Provinsi NTB diantara lain, (1) Angka Melek Huruf, (2) Pengangguran, (3) PDRB, dan (4) Pengeluaran Pemerintah : Kesehatan dan Pendidikan.

Azizah & Kusuma (2018) menyatakan bahwa pendidikan yang rendah merupakan salah satu dari karakteristik kemiskinan. Ada beberapa hal untuk mengukur tingkat pendidikan salah satunya adalah angka melek huruf yang merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana penduduk dalam suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Oleh karena itu, tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar yang efektif sehingga sebagian besar penduduk dapat memperoleh pengetahuan untuk menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: Badan Pusat Statistika NTB (Data diolah)

Gambar 1.1

Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Provinsi NTB Menurut Jenis Kelamin, 2015-2019 (persen)

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi NTB sejak Tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya tidak pesat. Pada tahun 2019, AMH Provinsi NTB mencapai 87,59 persen. Artinya adalah sebanyak 87,59 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi NTB yang telah bisa membaca dan menulis, baik itu berupa huruf latin atau huruf lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan AMH penduduk perempuan. Pada tahun 2019, AMH penduduk laki-laki mencapai 92,12 persen sedangkan AMH penduduk perempuan hanya 83,49

persen. AMH NTB setiap tahun mengalami peningkatan, namun pergerakannya sangat lambat dengan fluktuasi setiap tahunnya.

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan salah satunya adalah pengangguran dimana merupakan unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat yaitu tingkat pendapatan, Pendapatan masyarakat mendekati maksimum ketika kondisi tingkat pemanfaatan tenaga kerja penuh (full employment) dapat tercipta (Agustina et al., 2019).

Pengangguran dapat dikatakan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari, mempersiapkan, dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Tabel 1.3
Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB

Tahun	Persentase
2015	5,69
2016	3,94
2017	3,32
2018	3,72
2019	3,42

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi NTB

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015, tingkat pengangguran provinsi NTB berada pada level lebih dari 5 persen, yaitu sebesar

5,69 persen. Sedangkan angka tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, dimana tingkat pengangguran provinsi NTB berada pada level dibawah 5 persen. Semakin rendah angka tingkat pengangguran suatu wilayah, maka jumlah pengangguran dalam Angkatan kerja akan semakin sedikit. Daerah yang memiliki tingkat pengangguran di bawah 6-7 persen dapat dikatakan sebagai daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah *full employment*. Maka provinsi NTB selalu berada dalam posisi *full employment* dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu hal yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi di suatu daerah yang ditinjau dari sisi ekonominya. PDRB hanya sebuah gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat, sehingga tingginya PDRB tidak selalu menjamin bahwa seluruh penduduk pada suatu wilayah mendapatkan kemakmuran. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan, dalam hal ini semakin tinggi PDRB, maka semakin sejahtera penduduk pada suatu wilayah yang menyebabkan berkurangnya penduduk miskin (Alhudhori, 2017).

Tabel 1.4

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB (Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah
2015	89 337,99
2016	94 524,29
2017	94 608,21
2018	90 391,46
2019	94 014,74

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pengeluaran/ belanja pemerintah merupakan salah satu unsur kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, peluang kerja dengan cara memelihara kestabilan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Pertumbuhan pengeluaran/ belanja pemerintah dalam teori makro oleh para ahli diklaim dalam golongan pembangunan tentang peningkatan pengeluaran/ belanja. Pengeluaran/belanja pemerintah ialah suatu komponen penting yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Efek pengeluaran/ belanja pemerintah secara langsung atau tidak yang dideteksi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yaitu melalui pengeluaran/ belanja pemerintah pada bidang infrastruktur, Kesehatan, pendidikan dll (Amalia et al., 2015).

Menurut BPS, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk Kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah adalah minimal 10 persen dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Alokasi pembiayaan kesehatan tersebut ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar. Maka dari itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. Begitu juga dengan di daerah, alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya pendidikan, masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, terutama masyarakat yang tergolong dalam kategori penduduk miskin.

Tabel 1.5

Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Tahun	Kesehatan	Pendidikan
2015	52.488.332.245	38.484.860.861
2016	52.751.073.437	31.050.133.637
2017	509.043.355.540	1.841.069.417.716
2018	530.902.920.457	1.853.325.435.909
2019	685.096.678.254	1.934.350.297.217

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Syechalad dan Hamzah (2019) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh”. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan. Adapun perbedaan terletak pada teknis analisis regresi data linear berganda, variabel jumlah penduduk dan studi kasus di Provinsi Aceh, sedangkan peneliti menggunakan analisis data panel, variabel

jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggadini (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013”. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia harapan hidup dan pendapatan domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan angka melek huruf berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka serta menggunakan analisis regresi data panel. Adapun perbedaannya terletak pada variabel angka harapan hidup, pendapatan domestik regional bruto dan studi kasus di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penulis menggunakan variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah dan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mardiana et al., (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan”. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analisis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yaitu variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Adapun perbedaan terletak pada variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analisis) dan studi kasus di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan peneliti menggunakan variabel angka melek huruf, pdrb, menggunakan analisis data panel dan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019?

3. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian ini terdapat dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis, yaitu dapat dijadikan pengetahuan dan menambah wawasan serta diharap bisa digunakan untuk referensi mahasiswa di masa yang akan datang untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di provinsi nusa tenggara barat. Selain itu agar mengetahui pengaruh atas empat variable independent, yaitu pengangguran, angka melek huruf, produk domestik regional bruto (pdrb), dan pengeluaran pemerintah. Variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat dijadikan informasi untuk mata kuliah tentang tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan saat mengambil keputusan atau kebijakan untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.